

KELEMBAGAAN LAHAN KOMUNAL UNTUK PENGEMBANGAN TERNAK DI NTB (KASUS KABUPATEN SUMBAWA)

Mashur

Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Tenggara Barat.

Jl. Tawak-Tawak Kr.Sukun Mataram.

E-mail: mashur_ntb@yahoo.co.id

ABSTRAK: Lahan komunal sebagai padang penggembalaan di NTB sebagian besar terdapat di Pulau Sumbawa. Status lahan komunal di pulau ini sebagian besar milik negara. Pemanfaatan lahan komunal di NTB baru sekitar 20%, sehingga masih tersedia 80% lagi untuk pengembangan usaha ternak. Namun lahan komunal mempunyai kelemahan, terutama dalam penyediaan pakan pada musim kemarau dan kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan lahan sebagai basis pengembangan peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan padang penggembalaan, pola pemeliharaan ternak dan dukungan pemerintah dalam pengembangan pembibitan ternak sapi dalam sistem penggembalaan di Kabupaten Sumbawa. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada bulan Oktober 2013 dengan menggunakan pendekatan survey. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa sebagian lahan komunal belum dimanfaatkan untuk pengembangan ternak dan ada kecenderungan pengurangan lahan penggembalaan karena dialih fungsikan sebagai lahan pertanian. Pengelolaan lahan komunal belum maksimal sehingga ternak sering kekurangan pakan pada musim kemarau. Pola pemeliharaan ternak pada lahan komunal masih bersifat tradisional. Hal ini menyebabkan produktifitas rendah dan tingkat kematian ternak tinggi. Dukungan kelembagaan lokal dan kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan lahan komunal untuk pengembangan ternak relatif rendah. Untuk meningkatkan produktifitas ternak pada lahan komunal diperlukan perubahan pola pemeliharaan melalui pengembangan pakan hijauan.

Kata Kunci: Kelembagaan, Lahan Komunal, Pengembangan Ternak, Sumbawa

Abstract: Utilization of communal land in NTB about 20% and still available 80% for the development of livestock business. Therefore, communal land has weaknesses, especially in the provision of feed in the dry season, and lack of local government support in land use as a basis for livestock development. This study aims to determine the utilization of pastures, cattle rearing patterns, and government support in the development of cattle breeding. The study was conducted in Sumbawa Regency in October 2013 through a survey. The results show that some communal land has not been utilized for livestock development, and there is a reduction in pasture land as it is converted to agriculture. Communal land management is not maximized and has an impact on the lack of feed in the dry season. The pattern of livestock raising is still traditional. As a result, low productivity and increased mortality. Local institutional support and local government policy for communal land use for livestock development is relatively low. To improve the productivity of livestock, it is necessary to change the pattern of maintenance through the development of forage feed.

Keywords: Institutional, Communal Land, Livestock Development, Sumbawa

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan pertanian selama ini lebih diprioritaskan pada pengembangan tanaman pangan, terutama dilahan sawah. Sementara pembangunan daerah dilahan kering belum optimal sehingga terjadi ketimpangan kesejahteraan petani di antara kedua agroekosistem tersebut. Pembangunan pertanian yang lebih memprioritaskan aspek produksi menyebabkan

pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan relatif tertinggal. Menurut Pasandaran *et al.* (1993), SDM pertanian di wilayah lahan kering umumnya berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat adopsi teknologi pertanian di agroekosistem lahan kering.

Pembangunan peternakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum optimal. Hal ini

tercermin dari tidak berkembangnya kelembagaan sosial seperti kandang kolektif di Pulau Lombok dan kelembagaan lahan komunal di Pulau Sumbawa. Pengembangan peternakan melalui kelembagaan kandang kolektif di Pulau Lombok baru dimulai pada tahun 1990 an, sedangkan pemanfaatan kelembagaan lahan komunal dalam pengembangan peternakan di Pulau Sumbawa baru sebatas penerapan peraturan daerah tentang penggunaan lahan pengembalaan. Di Sumbawa, pengembalaan ternak dilakukan secara tradisional tanpa perencanaan dan manajemen yang baik, sehingga terlihat pengembangan pakan hijauan ternak untuk mendukung produktifitas ternak.

Secara umum, sistem pemeliharaan ternak di NTB tercermin dari kondisi yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. Di Pulau Lombok, misalnya, pemeliharaan ternak sebagian besar secara semi intensif (dikandangan pada malam hari) hingga intensif (dikandangan sepanjang hari), di Pulau Sumbawa, pemeliharaan ternak secara intensif tradisional (dilepas sepanjang hari) dan semi intensif (dikandangan pada malam hari) dikandang komunal, terutama pada musim hujan atau selama musim kemarau dikandangan pada waktu tertentu. Pemeliharaan ternak secara komunal dilakukan di padang pengembalaan, dilahan yang belum diusahakan bahkan dihutan negara, hutan rakyat, ladang/huma dan kawasan perkebunan. Padang pengembalaan ternak besar seperti sapi, kuda dan kerbau di wilayah lahan kering di NTB. Di Kabupaten Sumbawa, misalnya, luas padang pengembalaan (lar) pada tahun 2001 mencapai 2.825 ha yang mampu menampung 28.230 ekor ternak besar, tetapi baru dimanfaatkan 49,9% (Suwardji *et al.*, 2002).

Populasi ternak di NTB terdiri dari 76.622 ekor kuda, 695.951 ekor sapi, 155.904 ekor kerbau, 490.830 ekor kambing, dan 29.539 ekor domba (Dinas Peternakan dan Keswan NTB, 2010). Di Pulau Lombok, kepadatan ternak rata-rata 51 ekor per km², sedangkan di Pulau Sumbawa rata-rata 20 ekor km².

Berdasarkan sistem pengembalaan, pemeliharaan ternak secara komunal sudah makin terdesak, terutama di Pulau Lombok, sehingga banyak peternak beralih ke sistem ternak secara intensif atau semi intensif. Sistem pengembalaan sapi pada lahan komunal di Pulau Sumbawa masih terus dipertahankan, walaupun dihadapkan pada berbagai kendala, terutama alih fungsi lahan, status kepemilikan lahan, ketersediaan sumber air, tingkat

kesuburan, dan daya dukung pakan hijauan yang semakin berkurang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan padang pengembalaan, pola pemeliharaan ternak dan dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan perbibitan ternak sapi di Kabupaten Sumbawa.

METODE

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada bulan Oktober 2013, menggunakan pendekatan survei. Responden yang dipilih merupakan informan kunci di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Responden ditetapkan secara purposive sampling dengan menggunakan daftar pertanyaan semi struktur. Data yang dihipunk dianalisis secara diskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Lahan Komunal

Di Kabupaten Sumbawa, lahan komunal populer disebut "lar" (bahasa Sumbawa), artinya adalah padang pengembalaan ternak umum milik pemerintah daerah yang khusus digunakan sebagai tempat pemeliharaan ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) bagi masyarakat setempat pada waktu dan musim tertentu. Padang pengembalaan ini memiliki sumber air yang cukup dan terletak jauh dari pemukiman penduduk atau di pulau kecil (gili).

Luas lar bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan hektar, bahkan ribuan hektar yang terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa, dengan daya tampung ternak lebih dari 500 ekor. Jumlah pemilik ternak dalam satu lar berkisar antara 8–12 orang dengan satu unit kandang komunal. Kandang komunal hanya dimanfaatkan pada malam hari untuk mengandangan ternak agar aman dari pencurian, sedangkan pada siang hari ternak digembalakan di padang pengembalaan. Lar memiliki sumber pakan alami berupa rumput, semak belukar (legume semak), tumbuhan kayu dan sebagian yang tumbuh dialiran lar, serta memiliki sumber air yang memadai, sehingga walaupun tidak dikontrol selama satu hari ternak tidak akan mengalami kekurangan air dan pakan terutama pada musim hujan.

Di areal peternakan dengan sistem lar juga terdapat kelompok peternak yang membiarkan ternaknya dipadang pengembalaan dalam waktu yang cukup lama (lebih dari satu bulan). Walaupun jarang dikontrol, ternak di Kabupaten Sumbawa relatif aman dan hampir

tidak pernah terjadi pencurian. Pengontrolan ternak dipadang penggembalaan biasanya secara bergiliran antara anggota kandang komunal. Selama ini, permasalahan yang sering terjadi pada sistem lar adalah ancaman binatang buas, seperti anjing yang ada kalanya memakan anak sapi yang baru lahir, dan ancaman penyakit ternak serta keterbatasan hijauan pada musim kemarau. Ternak dikawasan lar biasanya diberikan vaksin dan pengobatan sekali setahun pada saat register ternak oleh dinas peternakan setempat.

Di Kabupaten Sumbawa terdapat delapan lar yang tersebar di beberapa kecamatan dan memiliki peraturan daerah. Munculnya peraturan daerah mengenai batas-batas lar dan pemanfaatannya dilatar belakangi oleh adanya keluhan dari masyarakat setempat tentang proyek perhutani dan perkebunan pada tahun 1990-an yang memakan lahan yang biasanya digunakan sebagai lar oleh masyarakat. Pembatasan pemanfaatan lar menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat yang khawatir akan terdesaknya lahan penggembalaan. Untuk menghindari terjadinya konflik sosial, pemerintah daerah setempat merasa perlu membuat peraturan daerah khusus yang mengatur peternakan sistem lar.

Ternak yang akan dijual biasanya ditangkap dengan menggiring ke kandang komunal yang terletak di dekat perkampungan atau bila masih di areal lar penangkapan biasanya dengan menggunakan tali yang dilemparkan ke leher ternak.

Ternak di Sumbawa umumnya dibiarkan berada di ladang, sawah atau lahan yang memiliki persediaan hijauan pakan yang cukup bagi ternak. Pagi hari ternak dibawa ketempat-tempat tersebut dan pulang ke kandang pada sore hari. Tapi ada juga yang membiarkan ternaknya berada di sawah atau ladang tanpa membawa pulang.

Tabel 1. Perkembangan ternak sapi pada padang pengembangan (*lar*) di Desa Boak dan Simu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. 2012.

Uraian	Desa Boak		Desa Simu	
	Jumlah (ekor)	%	Jumlah (ekor)	%
Induk	26	40,0	34	43,0
Jantan	1	1,5	-	-
Dara	1	1,5	2	2,5
Jantan muda	5	7,7	-	-
Anak jantan	17	26,2	17	21,5

Kelompok tani-ternak di Desa Boak dan Simu mempunyai polapemeliharaan yang hampir sama, yaitu sama-sama mengembalakan ternak di padang penggembalaan. Peternak di Desa Boak walaupun mengembalakan ternak tetapi pada waktu-waktu tertentu, terutama pada musim kemarau, memberikan tambahan pakan hijauan yang berkualitas pada ternaknya, seperti daun turi. Ternak dikumpulkan dibawah pepohonan dekat perladangan untuk diberikan hijauan pakan dari legume turi. Di desa ini banyak petani (44%) yang mencari rumput pakan ternak di tempat-tempat yang ketersediaan hijauan pakannya masih banyak. Sebanyak 33% petani seringkali membawa ternaknya ke dekatsaluran irigasi atau sawah untuk mencari pakan. Sebagian petani (11%) mendapatkan pakan hijauan dari sawah atau ladang sendiri.

Peternak di Desa Simu lebih banyak yang mengembalakan ternak di padang rumput pada siang hari tanpa memberikantambahan pakan yang berkualitas. Di desa ini ternak lebih banyak dibiarkan di ladang atau sawah yang ketersediaan pakannya banyak. Di tempat-tempat tersebut, sebagian besar petani (40%) membiarkan ternaknya mencari pakan sendiri. Meskipun demikian, masih ada petani yang mencari pakan yang diberikan kepada ternaknya pada sore hari di kandang komunal. Sebagian diantara mereka (47%) mencari rumput di lahan dekat saluran irigasi dan sedikit sekali petani (5%) yang mencari rumput dikebun sendiri.

Di Desa Boak dan Simu, perkembangan jumlah induk dan sapi dipelihara dengan sistem penggembalaan hampir tidak ada (Tabel 1). Perbedaannya, petani di Desa Boak lebih sering memberikan tambahan pakan pada ternaknya, terutama di siang hari. Kelompok ternak di kedua desa lebih dominan menggunakan lahan pribadi untuk mengembalakan ternaknya.

Anak betina	15	23,1	26	33,0
Jumlah	65	100	79	100

Sumber: Data sekunder, diolah

Lahan Komunal vs Lahan Sendiri

Secara umum, lahan komunal digunakan sebagai tempat penggembalaan bersama. Lahan pribadi hanya digunakan sebagai tempat penggembalaan ternak dalam jumlah yang relatif terbatas, sedangkan ternak dalam jumlah yang lebih banyak digembalakan dilahan komunal. Lahan komunal penting artinya bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pribadi atau bagi masyarakat yang memiliki ternak dalam jumlah yang cukup banyak tetapi tidak memiliki lahan pribadi yang cukup luas. Keuntungan lahan pribadi sebagai lahan penggembalaan selain dapat merencanakan penggunaannya juga dapat mengembangkan tanaman pakan hijauan untuk ternak. Lahan pribadi biasanya diberi pakan pembatas, sedangkan lahan komunal jarang dipagar.

Pemeliharaan ternak dengan sistem lar erat kaitannya dengan jumlah kepemilikan ternak dan musim tanam (musim hujan). Sebagian petani yang memiliki kebun atau ladang dengan jumlah sapi relatif sedikit (< 20 ekor) pada awal musim hujan memelihara sapi di ladang atau di kebun yang sudah dipagar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa ternak bisa mendapatkan rumput yang tumbuh dimusim hujan di ladang atau di kebun tanpa mengganggu tanaman orang lain. Selain itu sapi bisa dipakai untuk mengolah tanah. Pada musim kemarau atau pasca panen ternak dilepas di lahan sawah atau ladang dan memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakannya, seperti jerami padi, jerami kacang hijau, jerami kacang tanah, dan batang jagung. Pada akhir musim kering, ketersediaan pakan (limbah hasil pertanian) di areal tersebut biasanya sudah berkurang, sehingga ternak sering kali mencari pakan ketempat yang jauh atau ke hutan bila disekitarnya terdapat hutan, atau pemilik ternak membawa ternaknya ke areal lar.

Bagi peternak yang mempunyai ternak yang cukup banyak (> 30 ekor) atau peternak tidak mempunyai ladang atau kebun pada awal musim hujan membawa ternaknya ke areal lar untuk dilepas dan dikontrol sewaktu-waktu (seminggu sekali, sebulan sekali atau 2-3 bulan sekali), bergantung pada kesempatan pemilik ternak. Pada musim kering atau pada saat panen, ternak dibawa kembali ke sawah atau

ladang dan memanfaatkan limbah hasil pertanian sebagai pakan. Sebagian peternak yang memiliki ternak relatif banyak (> 50 ekor) memelihara ternaknya sepanjang tahun dengan sistem lar dan dikontrol sewaktu-waktu.

Peternak bisa membedakan ternak miliknya sendiri dengan milik orang yang lain dengan cara melihat tanda-tanda khusus pada ternaknya yang dewasa, seperti cap ternak yang sengaja dibuat ditubuh ternak, kalung yang diberikan ke ternak dengan tanda khusus, pemotongan sebagian kecil daun telinga pada saat anak sapi baru lahir. Pada orang tertentu yang mempunyai "kemampuan khusus" sehingga ternaknya tidak meninggalkan areal lar atau kelompok ternaknya. Salah satu cara adalah dengan mencabut bulu mata ternaknya. Cara ini dipercaya bisa menghindari wabah penyakit.

Jenis Ancaman yang Muncul Jika Lahan Komunal Berkurang

Kurang kondusif atau berkurangnya lahan komunal akibat peralihan penggunaannya berdampak terhadap peralihan tempat penggembalaan misalnya ke hutan penyangga, terjadi pengrusakan terhadap ladang dan perkebunan milik petani setempat. Untuk mengantisipasi hal ini Pemerintah Daerah telah menerapkan Peraturan daerah untuk membatasi penggunaan lahan sebagai lahan penggembalaan. Di samping itu, berkurangnya lahan komunal menyebabkan pemilik ternak cenderung akan mengurangi jumlah ternaknya dengan cara menjual.

Masalah lain yang timbul adalah terbatasnya ketersediaan pakan, terutama pada musim kemarau, sehingga ternak menjadi kurus, tingkat reproduksinya rendah, mudah tertular penyakit, dan tingginya angka kematian. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak terhadap penurunan populasi ternak di NTB. Untuk memperbaiki produksi ternak sapi di lahan komunal diperlukan perencanaan pemanfaatan lahan tersebut untuk penggembalaan dengan menggunakan konsep lahan berpindah. Di samping itu diperlukan upaya pengembangan pakan hijauan ternak agar mampu mendukung pengembangan ternak secara berkelanjutan.

Interaksi Individual dengan Lahan Komunal

Di lahan komunal, ternak individu dapat dilepaskan secara bebas tanpa perjanjian antara pemilik ternak dengan pemerintah atau instansi yang mengelola lahan komunal. Tidak ada batasan jumlah ternak yang dilepas atau dipelihara oleh individu di lahan komunal. Keberadaan kelompok di lahan komunal sangat bergantung pada daerahnya. Di Kabupaten Dompu, misalnya, tidak ada kelompok tani di lahan komunal. Sebaliknya, di Kabupaten Sumbawa terbentuk kelompok tani di lokasi lahan komunal atau di sekitarnya yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah. Status lahan komunal adalah milik negara, sehingga anggota masyarakat atau petani yang tidak termasuk dalam anggota kelompok juga dapat memanfaatkan lahan komunal.

Di NTB, pemeliharaan ternak dengan sistem penggembalaan di lahan komunal bertempat di Pulau Sumbawa. Penggunaan lahan komunal diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. Di beberapa kabupaten, penggunaan lahan komunal didasarkan pada Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola secara lebih intensif.

Batasan Lahan Komunal

Setiap atau beberapa desa harus memiliki lahan komunal sebagai tempat penggembalaan umum yang luasnya disesuaikan dengan jumlah ternak yang ada di desa tersebut untuk menjaga kemungkinan berkembangnya populasi ternak (Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 tahun 1992 tentang pemeliharaan ternak). Lokasi lahan komunal untuk tempat penggembalaan umum ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa atau beberapa desa. Semua peternak yang memelihara ternak dengan sistem penggembalaan diwajibkan menempatkan ternaknya di tempat penggembalaan umum. Kalau tidak mau, ternak harus dikandangkan atau diikat. Untuk menghindari kerusakan tanaman oleh ternak maka lokasi lahan komunal harus dipagar di kelilingnya. Peternak yang menempatkan ternaknya di areal penggembalaan umum diwajibkan mengawasi ternaknya tersebut.

Kelemahan dan Kekuatan Kelembagaan Lahan Komunal

Lahan komunal di NTB cukup luas sehingga dapat menampung ternak dalam jumlah cukup besar. Namun yang baru dimanfaatkan baru sekitar 20%, sehingga

masih ada 80% lahan yang belum dimanfaatkan. Dengan kata lain, masih tersedia lahan untuk menampung sekitar 2 juta ekor ternak lagi. Dari segi luasnya, lahan komunal cukup potensial untuk pengembangan peternakan, namun dari segi kualitas relatif masih rendah, terutama kemampuan dalam penyediaan pakan ternak, khususnya pada musim kemarau. Di samping itu, terbatasnya sumber mata air untuk minum ternak berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan reproduksi ternak.

Kelemahan dan kekuatan kelembagaan lahan komunal sangat ditentukan oleh kemampuan SDM, perencanaan dan sistem pengelolaan, permasalahan teknis dan biofisik, sinkronisasi aturan-aturan kelembagaan lokal dengan aturan Pemerintah Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah. Berikut adalah kelemahan dan kekuatan kelembagaan lahan komunal.

Kelemahan

1. Kemampuan SDM dalam meningkatkan potensi lahan komunal, seperti perbaikan pola pemeliharaan ternak, pengembangan pakan hijauan dan sumber air bagi ternak, relatif rendah.
2. Terbatasnya pakan hijauan pada musim kemarau sehingga tingkat kematian ternak relatif tinggi.
3. Tingkat penerapan teknologi reproduksi relatif masih rendah dan pengontrolan ternak yang kurang menyebabkan tidak diketahui waktu birahi ternak induk, termasuk jika ada penularan penyakit pada ternak.
4. Pembinaan terhadap kelompok tani-ternak dalam pengembangan pembibitan sapi pada lahan komunal relatif rendah dan sangat jarang dilakukan.
5. Aturan kelembagaan lokal dan aturan Pemerintah Daerah dalam penggunaan lahan komunal secara baik oleh masyarakat.
6. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan peternakan dengan memanfaatkan kelembagaan lahan komunal belum maksimal.

Kekuatan

1. Lahan komunal masih sangat luas sehingga masih ada potensi untuk mengembangkan ternak dengan sistem pada penggembalaan.
2. Perbaikan sistem pemeliharaan di lahan komunal dengan pola ladang berpindah, pengembangan pakan hijauan toleran kering, dan pengelolaan sumber air bagi ternak masih berpeluang cukup besar.

3. Pengembangan peternakan ke depan, terutama ternak sapi bali, melalui kelembagaan lahan komunal dengan dukungan kebijakan pemerintah masih dimungkinkan.
4. Penataan lahan komunal dengan pola ladang berpindah dapat memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan populasi ternak.

Untuk mendukung pengembangan peternakan di lahan komunal masih diperlukan pengembangan pakan hijauan ternak. Peningkatan produktivitas ternak ruminansia sangat bergantung pada ketersediaan pakan. petani berperan penting dalam penyediaan pakan untuk menunjang usaha ternak (Nulik dan Bamualim 1998).

Pakan hijauan merupakan salah satu masukan yang penting bagi ternak ruminansia. Pengembangan ternak, terutama ruminansia, sangat bergantung pada kecukupan pakan hijauan, baik jumlah dan mutu maupun kesinambungannya sepanjang tahun. Pakan hijauan ternak adalah rumput, legume herba, dan legume pohon/semak yang dapat digunakan sebagai pakan ternak (Home dan Stur 1999).

Posisi dan Peranan Pemerintah Daerah

Pengakuan atas lahan komunal diatur dalam Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 700 Tahun 2000 dan Nomor 1520 Tahun 2001 tentang izin membuka lahan untuk lokasi padang penggembalaan ternak dengan ketentuan bahwa status lahan yang dibuka adalah milik negara. Di Kabupaten Sumbawa, misalnya, penggunaan lahan komunal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 1992 tentang pemeliharaan ternak yang antara lain mengatur bahwa pemilik ternak dapat memelihara ternak dengan cara menggembalakan ternaknya di tempat-tempat yang tidak berdekatan dengan areal pertanian, hutan lindung, hutan produksi, dan hutan suaka alam (Pasal 3 Ayat 1). Setelah selesai menggembalakan ternak, para penggembala harus memasukkan kembali ternaknya ke kandang atau diikat (Pasal 3 Ayat 2).

SIMPULAN

1. Lahan komunal merupakan padang penggembalaan umum berupa lahan milik Pemerintah Daerah atau milik negara.
2. Lahan komunal milik negara dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat dalam satu atau beberapa desa.

3. Pengakuan atas lahan komunal diatur dalam Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Daerah.
4. Berdasarkan daya tampung ternak, baru sekitar 20% lahan komunal di NTB yang telah dimanfaatkan untuk padang penggembalaan sehingga masih terdapat sekitar 80% lagi yang belum dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ternak sapi.

DAFTAR RUJUKAN

- Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, 2004. Lahan Komunal Kabupaten Dompu. Dompu
- Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, 2004. Lahan Komunal Kab. Sumbawa. Sumbawa Besar.
- Dinas Peternakan NTB, 2012. Laporan Tahunan Dinas Peternakan Nusa Tenggara Barat Tahun 2012. Mataram.
- Pasandaran, E., Hermanto, Sumaryonto, dan N. Syafa'at, 1993. Investasi Pengembangan Pertanian di Lahan Kering: Suatu Pendekatan Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Lahan. Prosiding Lokakarya Status dan Pengembangan Lahan Kering di Indonesia. Mataram 16-18 November 1993. Buku I, Proyek P3NT.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, 2002. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 12 tahun 1992 tentang Pemeliharaan Ternak. Sumbawa Besar.
- Suwardji dan S. Tejowulan, 2002. Pengembangan Pertanian Lahan Kering Terpadu Dengan Penerapan Konsep "Master BLEQ" di Propinsi NTB. Pusat Pengkajian Lahan Kering dan Rehabilitasi Lahan (P2LKRI). Fakultas Pertanian Unram, Mataram.
- Suwardji, Amry Rakhman, H. Badrul Munir, dan Sri Tejowulan, 2002. Laporan Rencana Strategis Pengembangan Wilayah Lahan Kering Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pusat Pengkajian Lahan Kering dan Rehabilitasi Lahan (P2LKRL).